

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ukuran Pemerintah, Teknologi Informasi, Sumberdaya Manusia Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Ketidak berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, bukan memberi arti bahwa pengendalian intern tidak terlaksana. Kondisi ini terjadi sehubungan dengan aparatur sipil negara (ASN) melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah. Konsekuensi terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan daerah menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan daerah dengan nilai yang bernuansa kebenaran dan kewajiban.
2. Variabel Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berpengaruhnya ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan menunjukkan Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula aset yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga mendorong meningkatkan transparansi pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Kerinci karena pada dasarnya masyarakat akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan daerahnya.

3. Variabel Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketidak berpengaruhnya teknologi informasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah bukan dimaknai dengan tidak tersedia dan tidak layaknnya dari teknologi informasi. Keberadaan teknologi informasi yang dimiliki sekarang telah dirancang sejalan dengan kebutuhan informasi keuangan daerah. Kebutuhan informasi keuangan daerah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah. Informasi keuangan daerah yang dihasilkan oleh teknologi informasi telah mencerminkan nilai keuangan yang berbasis pada peraturan perundang-undangan. Akibatnya nilai yang termuat dalam informasi keuangan daerah yang dihasilkan dari teknologi informasi sudah memuat unsur transparansi.
4. Variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa sumber daya manusia di OPD Kabupaten Kerinci dapat dikatakan sudah dan mampu berkompeten pada penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan laporan keuangan yang berkualitas serta merata dapat mencapai karakteristik kualitatif keuangan. Kondisi demikian dikarenakan pengelola sumber daya manusia itu sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga yang

terinformasikan itu lah yang sebenarny dan mencerminkan keadaan sesungguhnya yang didukung oleh, pendidikan, kemampuan, pelatihan, pengalaman.

5.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan peneliti maka peneliti mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak OPD, diharapkan dapat menginformasikan informasi peraturan Perundang-Undang terbaru ke karyawan agar terciptanya kerja sama yang baik dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan-keterbatasan itu antara lain :

1. Pengumpulan data peneliti hanya bersumber dari kuesioner sehingga dapat mengumpulkan jawaban responden secara fleksibel.
2. Minimnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengakibatkan hasil penelitian terkendala ketika akan digeneralisasikan kepada seluruh OPD di wilayah provinsi jambi.